

# Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

## Daftar Isi

<b>Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah</b> Sri Juni Woro Astuti.....	85–94
<b>Media Pers Lokal Melawan Korupsi</b> Dwiyanto Indiahono .....	95–101
<b>Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</b> Machya Astuti Dewi .....	102–111
<b>Kampanye Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2009</b> Wahidah Zein Br Siregar .....	112–118
<b>Upaya Pengentasan Kemiskinan di Madura sebagai Model Pengembangan Tanggung Jawab Sosial</b> Ekna Satriyati dan Devi Rahayu.....	119–129
<b>Penyusunan Kebijakan <i>Partnership</i> dan <i>Development</i> dalam Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM</b> Priyono Tri Febrianto.....	130–138
<b><i>Social Early Warning System</i> untuk Mengantisipasi Konflik Sosial di Masyarakat</b> Karnaji, Septi Ariadi, Soebagyo Adam, dan Siti Mas'udah .....	139–151
<b>Kendala Pemerolehan Informasi Verbal Seputar <i>Issue Global Warming</i> pada Masyarakat Tamping</b> Moch. Jalal .....	152–161
<b>Study on Islamic Literature Viewed from Theosophical Perspective</b> Amir Fatah .....	162–167

# Penyusunan Kebijakan *Partnership* dan *Development* dalam Pemanfaatan Dana BUMN untuk Pengembangan UKM

Priyono Tri Febrianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo, Bangkalan, Madura

---

## ABSTRACT

*This research-based paper assumes that in the reform era the demands and insistence that SOEs are not merely pursuing economic motives. The research was conducted in 2 districts, Tuban and Jombang, using 100 respondents (SMEs). The result showed that more than half of the SMEs still have never received assistance from the state through the CSR program. In the implementation of the Community Development (or CSR) program, one of the target groups that needed and has been the focus of attention of SOEs in East Java is the perpetrators of SMEs. However, the involvement and support of the SOEs in the management and development of SMEs was a strategic step and had proven to have positive effects of acceleration in resolving poverty and empowerment of SMEs in East Java.*

**Key words:** *community development, corporate social responsibility, SME, SOE, empowerment*

---

Pendirian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sesungguhnya bukan sekadar bertujuan sebagai wadah untuk menampung aset asing yang dinasionalisasi sekitar tahun 1950-an atau untuk memenuhi kebutuhan produk dan jasa masyarakat yang rawan jika diserahkan kepada monopoli pihak swasta (Nugroho dan Siahaan 2005). Kehadiran dan pendirian BUMN sebetulnya juga bertujuan dan memiliki kewajiban moral untuk membantu dan memberdayakan warga masyarakat agar dalam kenyataan mereka tidak hanya menjadi penonton, apalagi mengalami marginalisasi akibat pembangunan industri raksasa di daerah sekitar mereka.

Dari segi ekonomi, kehadiran BUMN tentunya juga dituntut dapat meraih keuntungan yang maksimal dan dapat mandiri memenuhi kebutuhan kelangsungan usahanya (Srimulyo 2001). Tetapi, di era pascareformasi, tuntutan dan desakan agar BUMN tidak sekadar mengejar motif ekonomi umumnya makin menguat, dan di luar motif ekonomi, yang tak kalah penting BUMN juga dituntut untuk memperhatikan motif-motif sosial ikut bertanggung jawab membantu melayani dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Layaknya perusahaan komersial lain, kehadiran BUMN yang sekadar mengejar keuntungan dan tidak peka pada persoalan sosial masyarakat di sekitarnya, maka jangan kaget jika cepat atau lambat akan melahirkan resistensi, atau bahkan perilaku destruktif warga masyarakat yang merasa menjadi korban industrialisasi.

Selama ini, banyak bukti menunjukkan kegiatan industrialisasi perusahaan besar, termasuk BUMN

yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam, dan tidak melakukan reinvestasi bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat lokal (Triharso 2009). Hal ini akan menimbulkan sejumlah perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang bukan hanya mengancam kelangsungan ekosistem, tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat setempat akibat terjadinya proses marginalisasi.

Di berbagai daerah, kasus-kasus dehumanisasi industri yang terjadi acap kali melahirkan berbagai persoalan kemanusiaan, baik di kalangan buruh maupun masyarakat di sekitar. Padahal, sebagai kekuatan komersial yang banyak mengeksploitasi sumber daya alam setempat, yang dituntut sebetulnya bukan hanya akuntabilitas perusahaan, tetapi juga kepedulian dan pengakuan akan hak-hak publik. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, niscaya akan menghadapi berbagai masalah karena di era reformasi seperti sekarang ini jaminan kelangsungan hidup perusahaan bukan lagi pada kekuasaan dan senjata, melainkan pada *sense of belonging* masyarakat di sekitar perusahaan itu.

Dengan belajar dari banyaknya persoalan atau kasus yang muncul di berbagai daerah di mana pendirian dan beroperasinya perusahaan besar di wilayah tertentu cenderung memunculkan masalah. Masalah yang sering muncul antara lain protes masyarakat lokal, kesenjangan sosial yang tajam, dan sebagainya. Belakangan ini salah satu upaya yang dikembangkan perusahaan, termasuk BUMN untuk mencegah agar tidak direcoki dengan sikap resisten masyarakat lokal, dan sekaligus merupakan

bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, adalah dengan cara mengembangkan apa yang disebut *corporate social responsibility* (CSR).

Kendati awalnya peran perusahaan untuk membantu masyarakat hanya sekadar misi filantropis, dan acap kali bersifat spontanitas, dalam perkembangannya kemudian makin disadari bahwa keterlibatan dan peran aktif perusahaan untuk membantu melayani dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks investasi sosial perusahaan, pelayanan sosial dari perusahaan tidak dipandang semata-mata sebagai sekadar melunasi tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, melainkan sebagai bagian dari rekayasa sosial dan strategi perusahaan yang rasional, terencana dan berorientasi pada pencapaian keuntungan sosial jangka panjang bagi kedua belah pihak-pihak perusahaan dan pihak masyarakat.

Secara garis besar, permasalahan yang dicoba dikaji dalam kegiatan ini: (1) sejauhmana peran BUMN dalam mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan masyarakat di provinsi Jawa Timur? (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi para pelaku UKM untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan sejauhmana mereka membutuhkan dukungan kegiatan CSR dari BUMN untuk membantu kelangsungan hidup dan perkembangannya? (3) Kebijakan dan program pengembangan atau pemberdayaan UKM seperti apakah yang seharusnya dikembangkan BUMN lewat program CSR yang dimilikinya?

BUMN pada dasarnya adalah sebuah lembaga ekonomi berskala besar yang berkembang dan dikembangkan tidak hanya untuk mengejar motif-motif ekonomi, tetapi juga mengemban misi sosial untuk kepentingan rakyat. BUMN, seperti juga perusahaan besar lain memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu melayani dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Sesungguhnya ada banyak definisi mengenai CSR, tetapi secara umum CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues* (Sukadana & Jalal 2008).

Secara garis besar, *triple bottom lines* atau tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan perusahaan termasuk BUMN adalah: (1) *profit*, perusahaan

tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang; (2) *people*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Perusahaan, dalam hal ini perlu mengembangkan program tanggung jawab sosial perusahaan, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat; dan (3) *planet*, perusahaan dalam hal ini harus peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, dan pengembangan pariwisata (*ecoturisme*).

Keberadaan BUMN mengandung 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi pemerintah (*public*) dan dimensi badan usaha (*enterprise*). Makna dimensi publik dari BUMN dapat dijabarkan lagi menjadi *public purpose* yaitu tujuan yang berorientasi pada masyarakat, *public ownership* yaitu kepemilikan oleh negara, dan *public control*, yaitu adanya pengawasan oleh masyarakat. Inti permasalahan dari BUMN sebenarnya terletak pada *public purpose*, karena merupakan alasan mengapa BUMN didirikan. Ia dapat dijabarkan sebagai hasrat dari pemerintah untuk mencapai cita-cita pembangunan, baik dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Persoalannya adalah bagaimana mendefinisikan *public purpose* secara jelas, sehingga tidak dimungkinkan bagi pemerintah untuk merumuskan *public purpose* tersebut secara pragmatis, sebagai akibat terjadinya perbedaan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

*Public purpose* inilah yang membedakan BUMN dan swasta, sebagaimana dikemukakan oleh Harianto (1991) bahwa yang membedakan BUMN dengan perusahaan swasta adalah kejelasan mekanisme dan prosesnya. Bila perusahaan swasta memiliki hanya satu hierarki pengambil keputusan dengan prioritas yang jelas, maka di BUMN justru majemuk di tingkat atas pengambilan keputusan, dengan berbagai kepentingan dan prioritas seperti adanya departemen teknis di samping departemen keuangan yang membawahi BUMN itu sendiri.

Dimensi badan usaha (*enterprise*) BUMN meliputi: (a) bidang usaha; (b) konsep *return on investment* (ROI); (c) *public* dan *private goods*; (d) pemasaran produk; (e) konsep pendapatan;

(f) konsep *entrepreneurship*; dan (g) konsep akuntansi. Dalam dimensi ini BUMN diharapkan berada dalam salah satu atau lebih sektor ekonomi seperti: pertanian, industri manufaktur, pertambangan, perdagangan, komunikasi, jasa, konstruksi dan sebagainya. Investasi yang ditanamkan pada sektor-sektor ekonomi tersebut diharapkan mampu menghasilkan surplus atau keuntungan. Oleh karena itu para pengelola BUMN haruslah memiliki jiwa kewirausahaan, yaitu kualitas yang dinamis, kreatif, dan berani menanggung risiko.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, telah berhasil diidentifikasi beberapa ciri sektor industri kecil atau UKM di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha; (2) struktur organisasi bersifat sederhana; (3) jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar; (4) tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan; (5) sistem akuntansi kurang baik, bahkan tidak memiliki; (6) skala ekonomi terlalu kecil, sehingga sukar menekan biaya, (8) kemampuan pemasaran dan deversifikasi usaha terbatas; (9) margin keuntungan sangat tipis; (10) tidak mampu memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh bantuan bank; (12) cenderung melakukan pemasaran langsung kepada konsumen; (13) tingkat ketergantungan kepada fasilitas pemerintah cenderung sangat besar; dan (14) cenderung menggunakan teknologi tradisional (Baswir 1995).

Sementara itu, Suprakeikno (1994) menyebutkan sejumlah faktor yang memungkinkan usaha kecil mampu bertahan dan tetap *survive* dari iklim persaingan yang makin ketat dan keras. Pertama, karena UKM bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah (*fragmented market*). Kedua, usaha industri kecil menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Ketiga, usaha kecil memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan. Keempat, usaha kecil tergabung dalam suatu *cluster* (sentra industri), sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif, misalnya dalam pembelian bahan baku, pemanfaatan tenaga kerja trampil dan pemasaran bersama. Kelima, usaha berskala kecil diuntungkan oleh kondisi geografis, yang membuat produk-produk industri kecil memperoleh proteksi alami karena pasar yang dilayani tidak terjangkau oleh invasi produk-produk berskala besar.

## Metode Penelitian

Kegiatan ini pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memetakan potensi BUMN dalam upaya pengembangan UKM di provinsi Jawa Timur, tetapi sekaligus juga merumuskan kebijakan dan program *partnership and development* dalam pemanfaatan dana BUMN untuk pengembangan UKM di berbagai daerah di provinsi Jawa Timur. Agar bisa diperoleh hasil yang benar-benar maksimal, secara rinci, langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah:

Pertama, melakukan *review* terhadap berbagai kajian dan penelitian tentang kondisi dan perkembangan BUMN dan kegiatan CSR yang biasa dikembangkan dunia industri. *Review* ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang peran BUMN dan perkembangan kegiatan CSR yang bermanfaat dalam mendukung upaya pemberdayaan kegiatan UKM.

Kedua, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data terbaru tentang kondisi BUMN dan UKM di provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melacak data dari dinas koperasi dan UKM, dinas pemberdayaan masyarakat, dinas perindustrian dan perdagangan, dan badan pusat statistik Jawa Timur.

Ketiga, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari para warga masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan ekonomi kerakyatan atau UKM. Data primer tentang problema dan kebutuhan pelaku UKM ini digali dari 2 kabupaten, yakni kabupaten Tuban dan kabupaten Jombang. Jumlah warga masyarakat yang dicoba digali aspirasinya ditentukan sebanyak 100 pelaku UKM, dan mereka semua dipilih secara *purposive* dari desa-desa yang diketahui merupakan sentra UKM di wilayahnya. Di kabupaten Jombang, desa yang menjadi lokasi penelitian adalah sentra industri kecil krupuk dan manik-manik, sedangkan di kabupaten Tuban, desa UKM yang diteliti adalah sentra industri kecil batik dan makanan kecil kripik.

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini, selain digali melalui wawancara langsung dengan dipandu perangkat kuesioner yang terstruktur yang sudah dipersiapkan sebelumnya, juga dilacak lebih jauh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam ini perlu dilakukan, sebab studi ini tidak hanya menginventarisasi aspirasi warga masyarakat di seputar upaya pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan, tetapi juga berusaha

merumuskan program yang benar-benar kontekstual dan tepat bagi upaya pengembangan kegiatan UKM lewat dana CSR dari BUMN.

Seluruh data yang dikumpulkan, setelah dilakukan pemilahan menurut aspek yang telah dirinci, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan cara membandingkan dengan kajian lain tentang peran CSR dan dinamika UKM yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai penelitian sebelumnya.

## Hasil dan Pembahasan

Akibat kenaikan harga BBM dan menurunnya daya beli masyarakat, dalam satu-dua tahun terakhir omset dan jumlah order responden memang cenderung turun, dan keuntungan yang diperoleh pun juga berkurang. Tetapi, karena mengembangkan usaha sampingan disadari juga tidak mudah, maka yang bisa dilakukan para pelaku UKM saat ini adalah bagaimana mencoba bertahan hidup dan tetap berusaha mengembangkan pangsa pasar lewat berbagai usaha, antara lain mengembangkan diversifikasi produk agar pasar tidak jenuh.

Dari hasil wawancara diketahui, kegiatan diversifikasi produk yang dikembangkan para pelaku UKM di provinsi Jawa Timur umumnya adalah menyangkut keragaman variasi produk (73%), corak (65%), pewarnaan (76%), kemasan (46%), model atau bentuk (65%). Dari 100 pelaku UKM yang diwawancarai, sekitar tiga perempat responden mengaku melakukan upaya pengembangan diversifikasi produk dalam rangka pengembangan dan demi memperluas pangsa pasar. Para pelaku UKM pembuatan batik di Tuban, misalnya, menurut pengakuan mereka dalam satu-dua tahun terakhir ini mencoba mengikuti kebutuhan pasar dengan menciptakan corak dan motif batik yang bervariasi, disesuaikan dengan permintaan. Demikian pula untuk pengerjaan manik-manik di Jombang. Ketika pasar mulai jenuh dengan motif dan warna manik-manik tertentu, maka mereka pun tak segan melakukan eksplorasi untuk mengembangkan motif dan warna-warna yang lebih menarik sesuai permintaan pasar.

Di lingkungan masyarakat desa, peran industri kecil tidak jarang merupakan aktivitas *off-farm*, bersifat kerja sambilan, kadang juga musiman, dan yang terpenting hasilnya bersifat harian atau borongan cukup membantu keluarga di desa yang menjadi pelaku UKM untuk bertahan hidup. Bagi tenaga kerja perempuan (61%), terutama, bekerja di sektor industri kecil menjadi daya tarik tersendiri, karena pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan di rumah sembari menyelesaikan berbagai pekerjaan domestik,

seperti mengasuh anak-anak, membersihkan rumah atau memasak. Sementara itu, bagi penduduk desa laki-laki (39%), keberadaan UKM adalah semacam jalan alternatif untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari, terutama ketika sektor pertanian tidak lagi dapat diharapkan.

## *Eksistensi dan Peran UKM*

Berbagai kajian sebetulnya telah banyak membuktikan bahwa daya tahan dan kelangsungan usaha UKM acap kali tangguh. Berbeda dengan usaha berskala besar yang rentan terhadap kondisi dan fluktuasi perekonomian, UKM justru sering kali tetap mampu *survive* karena faktor-faktor internal yang mendukungnya.

Di berbagai desa, keberadaan industri kecil selalu memiliki peluang untuk *survive*, karena mereka senantiasa dinamis mencari dan mengisi relung-relung pasar yang tidak digarap atau tidak sempat digarap oleh industri menengah dan besar (Nurasa 1994). Artinya, karena produk-produk yang dihasilkan sifatnya khas, cenderung hanya dikonsumsi dalam kelompok yang terbatas, dan keuntungan yang diperoleh acap kali juga kurang menarik bagi usaha berskala menengah dan besar, maka dalam banyak kasus pangsa pasar produk usaha kecil umumnya aman dari incaran pengusaha kelas menengah dan atas.

Ancaman yang dihadapi dan kadang tak terduga mengganggu kelangsungan usaha berskala kecil justru acap kali datang dari faktor-faktor yang sifatnya eksternal makro, seperti kondisi perekonomian nasional atau kebijakan pembangunan yang kontra-produktif bagi kelangsungan UKM. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM belum lama ini, misalnya, adalah salah satu pukulan susulan yang benar-benar memengaruhi kelangsungan hidup UKM.

## *Kendala Pengembangan UKM*

Studi ini menemukan, nyaris pada semua tahap mulai dari proses produksi, permodalan, biaya, pemasaran hingga pengelolaan-- dikeluhkan sebagian besar pelaku UKM. Bagi pelaku usaha kecil, jelas salah satu faktor yang menghambat adalah permodalan. Sebanyak 47% menyatakan faktor permodalan merupakan hal yang sangat menghambat, dan sebanyak 27% responden menyatakan tidak dimilikinya atau sulitnya mengakses sumber-sumber permodalan adalah faktor yang menghambat upaya mereka mengembangkan UKM. Dalam banyak

kasus, UKM bahkan acap kali sulit berkembang, dan bahkan cenderung stagnan karena terjadinya pengikisan modal usaha akibat perangkap utang yang diciptakan pengijon atau pedagang perantara. Bisa dibayangkan, apa yang bakal terjadi jika para pelaku usaha kecil sebagian besar adalah penduduk miskin yang untuk hidup sehari-hari saja relatif pas-pasan. Jangankan berbicara tentang jumlah tabungan dan akumulasi modal yang dilakukan, tidak jarang terjadi justru mereka terperangkap dalam jerat utang yang membuat para pelaku UKM terpaksa menerima nasib: memperoleh keuntungan terkecil dibandingkan beban dan risiko kerja yang mereka lakukan. Sebagai layaknya usaha yang berskala kecil, teknologi yang dipergunakan dalam UKM umumnya sederhana, sehingga dalam soal biaya produksi dan kualitas produk yang dihasilkan akhirnya banyak pelaku UKM yang terhambat.

Kendala lain yang menghambat upaya pengembangan usaha berskala kecil adalah menyangkut soal pemasaran. Sebanyak 31% responden menyatakan pemasaran merupakan faktor penghambat upaya mereka dalam mengembangkan usahanya, dan bahkan sebanyak 33% responden yang lain menyatakan sangat menghambat. Di berbagai lokasi studi ditemukan sebagian besar pelaku UKM umumnya tidak memiliki akses yang cukup terhadap pasar, dan mereka umumnya memiliki posisi *bargaining* yang lemah dalam penetapan harga produk.

Di bidang manajemen dan pengelolaan, para pelaku usaha kecil umumnya juga masih berkatut dengan model-model pengelolaan yang sederhana, sehingga agak sulit diharapkan dapat segera memberdayakan dirinya. Sebanyak 21% responden menyatakan masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan manajemen, dan bahkan sebanyak 28% menyatakan sangat kesulitan atau sangat terhambat.

Berharap pelaku usaha kecil dapat mengelola usahanya secara profesional dan efisien sering kali menjadi hal yang sulit, karena sifat usaha kecil itu sendiri yang kebanyakan masih subsisten. Hampir semua pelaku usaha kecil umumnya tidak membedakan dengan tegas antara modal dan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tanpa disadari sering yang namanya modal usaha terpaksa berkurang atau bahkan habis karena terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tekanan kemiskinan, memang acap kali membuat pelaku usaha kecil menjadi rentan dan sulit mengakumulasi modal untuk mendukung pengembangan usahanya.

Sebagian pelaku UKM menyatakan, mereka sebetulnya bukan tidak mengerti bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil produksinya sebagian harus ditabung untuk modal usaha, bahkan kalau bisa diperbesar. Tetapi, ketika kebutuhan hidup, biaya kesehatan naik, dan tidak ada alternatif sumber penghasilan yang diperoleh, maka tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan kecuali bersikap hidup hemat dan jika terpaksa memanfaatkan keuntungan itu untuk hidup tanpa berpikir lebih jauh tentang arti penting mengakumulasi modal.

### ***Peran BUMN dalam Pengembangan UKM melalui Program CSR***

Sejauh ini banyak pihak mengakui bahwa eksistensi sektor usaha kecil dan menengah merupakan salah satu alternatif mata pencaharian yang cukup berpotensi dan cukup prospektif bagi masyarakat di berbagai wilayah di propinsi. Dalam berbagai studi yang dilakukan menunjukkan bahwa sektor ini ternyata terbukti mampu secara fungsional memberikan kontribusi dan tambahan pemasukan bagi keluarga-keluarga miskin yang menekuni usaha di sektor tersebut.

Pelaku UKM mengakui bahwa sejauh ini telah cukup banyak program yang diarahkan untuk membantu pengembangan sektor UKM termasuk yang dilakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan menyediakan berbagai peraturan dan beberapa *skim* paket kredit skala kecil. Selain itu juga mengembangkan dan memperkenalkan gerakan program kemitraan usaha serta berbagai jenis kebijakan lainnya. Berbagai program tersebut memperlihatkan adanya pemihakan pemerintah terhadap aktivitas usaha ekonomi rakyat tersebut. Meski demikian sampai saat ini masih cukup banyak pelaku UKM yang masih memerlukan perhatian dan bantuan akibat berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi ketika menjalankan aktivitas usaha mereka.

Kendati banyak permasalahan yang menghambat perkembangan UKM tetapi dari hasil berbagai studi yang dilakukan memperlihatkan bahwa faktor permodalan dan pemasaran merupakan permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh pelaku UKM. Permasalahan permodalan memang menjadi salah satu problematika penting dalam aktivitas usaha. Sebab besar kecilnya dan lancar tidaknya kegiatan usaha juga bergantung pada berapa besar modal yang diinvestasikan. Belum lagi masalah asal modal. Jika modal dapat digali secara mandiri baik dari tabungan

atau dari keluarga mungkin tidaklah terlalu rumit ketika kegiatan usaha berlangsung kemudian. Tetapi jika modal usaha berasal dari pinjaman maka pelaku usaha memiliki tanggung jawab dan kewajiban lain yakni harus mengembalikan pinjaman tersebut. Persoalannya adalah jika pemasaran produk berjalan menghadapi hambatan sehingga keuntungan tidak dapat diraih. Jika hal tersebut terjadi maka bukan tidak mungkin usaha sulit dikembangkan di masa yang akan datang.

Memperhatikan hasil kajian ini terlihat bahwa sebagian besar pelaku UKM ternyata asal modal usaha mereka dari dukungan internal keluarga. Dari data yang ada juga terlihat sebanyak 70% yang membuka usaha dari dukungan internal keluarga. Menurut pengakuan sebagian besar responden modal yang mereka dapatkan dari hasil pinjaman dan mendapatkan fasilitas pinjaman dari lembaga kredit formal. Sebanyak 60,7% responden mengaku memperoleh pinjaman dari lembaga kredit formal untuk membuka usaha di sektor UKM. Dari hasil penelitian ini juga terungkap bahwa para pelaku usaha banyak yang memilih lembaga kredit formal dengan bunga yang dinilai relatif rendah. Sementara itu sebanyak hampir 40% responden mengaku untuk membuka usaha mereka melakukan peminjaman pada lembaga kredit informal. Selain waktu pembayaran yang fleksibel dan prosedur yang tidak berbelit kemudahan untuk mengakses lembaga kredit tersebut merupakan pertimbangan lain mengapa mereka banyak yang memanfaatkan lembaga kredit informal. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa tidak sedikit pelaku UKM yang memanfaatkan peran positif dari pihak perusahaan khususnya BUMN dalam upaya pengembangan usaha mereka.

Tidak sedikit pelaku usaha UKM yang diwawancarai menyebutkan bahwa sampai saat ini sebenarnya mereka masih membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Persoalan lain yang kerap kali dihadapi mereka adalah pengetahuan tentang prosedur peminjaman yang relatif terbatas dan tidak adanya agunan yang dapat dijaminkan maka kerap kali pelaku usaha berpikir dua kali untuk mengakses sumber permodalan seperti perbankan. Sesungguhnya salah satu pihak yang cukup potensial untuk dapat membantu para pelaku UKM dalam mengembangkan usaha mereka adalah pihak BUMN melalui aktivitas *community development* (CD) atau *corporate social responsibility* (CSR). Tetapi bagaimana peran pihak-pihak ini selama ini?

Dari data yang ada menunjukkan bahwa selama ini para pelaku usaha UKM yang diwawancarai mengaku pernah bahkan sering mendapatkan

bantuan dari pihak BUMN melalui program CD atau CSR. Bantuan yang diperoleh berupa bantuan modal, peralatan, pelatihan teknologi, pemagangan dan penyuluhan dengan intensitas yang bervariasi. Tetapi jika diamati secara lebih detail ternyata sejauh ini peran BUMN melalui program CSR masih belum terlampaui menyentuh banyak pelaku UKM. Setidaknya dari hasil kajian ini terlihat masih banyaknya pelaku UKM yang belum mampu mengakses program CSR yang dilakukan oleh berbagai jenis BUMN.

Hasil kajian memperlihatkan bahwa lebih dari separuh responden yakni para pelaku UKM yang ditemui dalam penelitian ini menyebutkan bahwa selama ini mereka masih belum pernah memperoleh bantuan dari pihak BUMN melalui program CSR. Dalam hal permodalan misalnya sebanyak 61,3% mengaku belum pernah mendapatkan program bantuan demikian juga dengan pelatihan, penyuluhan dan peralatan. Bahkan sebanyak 77,4% responden mengaku belum pernah mendapatkan bantuan berupa pemasaran produk UKM yang mereka hasilkan.

Ketidaktahuan pelaku UKM tentang adanya aktivitas CSR yang dilakukan oleh banyak BUMN di Jawa Timur sebenarnya perlu disikapi secara positif yakni dengan menggiatkan aktivitas sosialisasi tentang program CSR beserta jenis kegiatannya. Dari data yang ada selama ini telah cukup banyak BUMN yang menyelenggarakan kegiatan CSR.

Data menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mengaku pernah mendapatkan bantuan dari Semen Gresik dan Telkom. Sebanyak 36,4% mengaku pernah mendapatkan bantuan dari pihak perusahaan Semen Gresik dan sebanyak 23,6% pernah mendapatkan bantuan dari pihak Telkom.

Sebanyak 30,9% responden mengaku baru saja menerima bantuan dari program CSR. Jenis bantuan yang diberikan umumnya dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat lunak atau ringan. Sebanyak 33,3% responden mengaku selama ini memperoleh bantuan modal usaha dengan bunga yang ringan. Sementara itu sebanyak 21,6% responden mengaku memperoleh bantuan dalam bentuk sistem bapak angkat atau kemitraan. Meski banyak yang mendapatkan bantuan dalam bentuk pinjaman dan kemitraan tetapi sebanyak 23,5% mengaku bahwa bantuan yang mereka terima dalam bentuk hibah. Jenis bantuan seperti ini tentu sangat menguntungkan responden karena pelaku usaha tidak perlu pusing dengan proses pengembalian bantuan modal usaha yang mereka terima dari program CSR tersebut.

Bantuan yang diterima oleh pelaku UKM selama ini diakui memberikan dampak cukup signifikan terutama dalam penambahan modal usaha kendati kadang dinilai masih relatif kecil jumlahnya. Meski demikian jenis bantuan yang lainnya seperti pelatihan, pemagangan, teknologi pendukung, pemasaran oleh pelaku UKM dinilai juga memberikan kemanfaatan bagi pengembangan usaha yang mereka tekuni. Diakui oleh banyak pelaku UKM selama ini berbagai jenis bantuan yang diberikan dirasakan telah cukup memberikan manfaat tidak hanya dari sektor permodalan tetapi juga aspek pemasaran dan proses produksi. Setidaknya dari kajian ini ditemukan sebanyak 93% responden mengemukakan bahwa bantuan dari program CSR sangat membantu mereka dalam upaya mengembangkan usahanya. Hanya sebanyak 4% saja yang menyatakan kurang membantu atau tidak membantu.

Dari berbagai jenis bantuan yang diberikan ternyata sebagian besar pelaku usaha mengakui bahwa bantuan yang mereka terima selama ini dinilai kurang bahkan tidak memuaskan. Dalam hal permodalan misalnya sebanyak 73% lebih responden mengaku kurang puas bahkan merasa bantuan tersebut tidak memuaskan. Tidak sedikit responden mengemukakan bahwa bantuan yang diberikan masih dinilai kecil dan konsistensinya masih belum terjaga. Sehingga untuk mengembangkan usaha pun dinilai masih kurang.

Selain dalam hal permodalan jenis bantuan lainnya juga dinilai masih belum terlalu memuaskan. Dari data yang ada jenis bantuan yang banyak dinilai kurang memuaskan dan tidak memuaskan selain masalah modal usaha adalah bantuan pelatihan teknologi, penyuluhan, pemagangan serta pemasaran. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa persoalan yang kerap kali dihadapi oleh pelaku UKM dalam kelangsungan usaha mereka selain permodalan adalah pemasaran. Oleh sebab itu jika aspek pemasaran tidak mendapatkan perhatian atau bantuan yang diterima masih dinilai belum memuaskan maka dikhawatirkan pengembangan sektor UKM akan tersendat dan tidak dapat berkembang secara optimal.

Selama ini berbagai jenis bantuan yang diterima oleh para pelaku UKM dari pihak BUMN ternyata sebagian besar masih dinilai kurang bahkan tidak memuaskan. Dari hasil kajian yang dilakukan ternyata ketidakpuasan tersebut bersumber pada berbagai persoalan antara lain; (a) sosialisasi program CSR dari BUMN yang selama ini dinilai terbatas dan belum dapat menyentuh seluruh pelaku UKM yang ada; (b) akses pelaku UKM terhadap

program CSR yang dilakukan oleh BUMN belum maksimal; (c) besar bantuan modal usaha yang diberikan dinilai terlampau kecil khususnya untuk kepentingan pengembangan usaha yang ditekuni; (d) jenis bantuan yang diberikan belum menyeluruh dalam arti masih bersifat parsial misalnya hanya masalah modal saja tetapi untuk komponen usaha yang lain belum disentuh; (e) intensitas bantuan yang diberikan rendah dan cenderung bersifat eksidental saja tanpa ada kelanjutannya; (f) belum adanya pendampingan dari pihak BUMN. Kalaupun ada biasanya belum dilakukan secara menyeluruh dan belum terlalu intens; (g) monitoring dan evaluasi terhadap berbagai jenis program bantuan yang diberikan belum optimal; (h) tingkat keberlanjutan belum maksimal.

Sebanyak 75% responden yakni para pelaku usaha menyebutkan bahwa kelemahan pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh pihak BUMN masih menyertakan sejumlah problematika baik dalam hal sosialisasi, intensitas dan keberlanjutan program, keluasan sasaran serta besar dan jenis bantuan yang diberikan. Artinya secara substansial sesungguhnya bantuan yang diberikan merupakan langkah yang positif dan strategis namun dalam tataran implementasi tampaknya masih perlu memperoleh perhatian baik dalam hal besaran bantuan, jenis bantuan maupun daya keberlanjutan atau *sustainability*-nya.

Mencermati permasalahan sebagaimana terurai di atas, pihak BUMN melalui program CSR nya perlu melakukan langkah strategis guna memberdayakan dan mengembangkan UKM yang banyak ditekuni masyarakat di berbagai wilayah di provinsi Jawa Timur. Strategi bisa diarahkan tidak hanya menyangkut soal pengenalan program CSR dan aksesnya tetapi juga pada upaya pengembangan pola pembiayaan dan prosedur yang mudah bagi pelaku UKM serta mempermudah akses terhadap permodalan bagi pengusaha UKM yang disediakan oleh pihak BUMN melalui program CSR nya. Melalui kegiatan yang berorientasi pada upaya penguatan permodalan tersebut diharapkan kebutuhan pelaku UKM dalam melangsungkan kegiatan ekonomi produktifnya dapat terpenuhi. Selain itu aktivitas lain yang sangat penting adalah melengkapi UKM dengan peralatan, pelatihannya, pemagangan serta melakukan pendampingan secara optimal.

Oleh sebab itu ke depan melalui program CSR yang diselenggarakan oleh berbagai BUMN diharapkan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka memperlancar upaya pengembangan sektor UKM dapat teratasi. Ketika ditanyakan hal-

hal apa saja yang diinginkan oleh pelaku UKM jika ada bantuan dari pihak BUMN melalui program CSRnya. Ternyata sebagian besar menginginkan adanya prosedur yang mudah ketika mengakses program CSR tersebut. Ada sejumlah 89% responden menyatakan jika memungkinkan prosedur untuk memperoleh bantuan melalui program CSR tidaklah terlampau rumit. Sebab dengan kemudahan yang diperoleh mereka yakin bahwa bantuan yang diterima akan sangat membantu pengembangan usaha UKM yang mereka tekuni. Sementara itu sebanyak 88% responden mengatakan bahwa jika bisa bantuan lebih difokuskan pada bantuan modal usaha. Kondisi ini sangat masuk akal sebab selama ini keluhan yang banyak dikemukakan oleh pelaku UKM dalam mengembangkan usaha mereka adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki.

Hal lain yang sangat diinginkan pelaku UKM adalah bahwa bantuan hendaknya disesuaikan dengan jenis kebutuhan UKM. Selain itu bentuk bantuan juga diharapkan bervariasi serta waktu pengembalian bantuan jika dalam bentuk modal usaha dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan tidak membebani para pelaku UKM.

Persoalan yang diharapkan pelaku UKM yang juga terlihat banyak diharapkan oleh pelaku UKM adalah; bentuk bantuan bervariasi; adanya pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh pihak BUMN; dilakukannya pelatihan manajerial dan membantu meningkatkan *skill* penguasaan teknologi pendukung. Selain itu hal yang tergolong penting dalam mata rantai aktivitas usaha adalah masalah pemasaran. Dalam hal ini banyak responden mengharapkan adanya bantuan pemasaran produk agar produk UKM yang mereka hasilkan dapat laku di pasaran baik di dalam maupun luar negeri.

Responden juga mengharapkan bantuan teknologi pendukung. Mereka mengakui bahwa untuk meningkatkan produksi UKM yang ditekuni mereka sangat membutuhkan teknologi pendukung. Selain untuk membantu mempermudah proses produksi keterlibatan teknologi pendukung juga akan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi.

Ketika ditanyakan kira-kira aspek usaha apa saja yang dinilai akan terdampak jika menerima program CSR dari BUMN? Ternyata dari kajian yang dilakukan sebagian besar mengemukakan bahwa aspek permodalan merupakan aspek usaha yang paling mendapatkan pengaruh jika ada bantuan CSR. Melalui suntikan dana dari program CSR mereka memiliki peluang untuk mengembangkan usaha UKM yang mereka tekuni. Setidaknya selain

volume produksi dapat ditingkatkan sesuai dengan permintaan pasar mereka juga dapat mengembangkan dan memperluas area pemasaran produk UKM.

Meskipun sebagian besar pelaku UKM menyebutkan bahwa aspek usaha yang terdampak adalah sektor permodalan tetapi dari data yang ada terlihat juga bahwa aspek pelatihan, pemagangan, penyuluhan bantuan manajerial dan pemasaran serta peralatan juga akan terpengaruh dengan adanya bantuan tersebut. Diakui oleh banyak pelaku UKM bahwa program CSR yang diluncurkan oleh berbagai jenis BUMN ternyata juga memberikan kemanfaatan luar biasa dalam keseluruhan aktivitas usaha mereka. Para pelaku usaha mengakui kemanfaatan yang diterima tidak hanya dalam hal kelangsungan usaha semata melainkan juga multiplier effect yang ditimbulkan seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi mereka. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan sebanyak 94% responden mengaku bahwa selama ini omzet usaha mereka juga mengalami peningkatan. Artinya dengan bantuan yang diberikan oleh BUMN melalui program CSR akan mampu menghela laju perekonomian aktivitas usaha mereka.

Tetapi yang kerap kali dihadapi oleh pelaku usaha dalam rangka pengembangan UKM adalah masalah kualitas sumber daya manusia. Diakui bahwa selama ini telah cukup banyak upaya dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan kegiatan usaha di sektor UKM. Tetapi permasalahan senantiasa menyertai dalam proses pengembangannya. Hasil penelitian yang dilakukan ini setidaknya memperoleh data bahwa faktor permodalan, pemasaran, stabilitas harga, merupakan kendala cukup signifikan di samping persoalan keterbatasan atau kualitas sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta dalam pengembangan sektor ini masih senantiasa diperlukan. Sebab dari hasil penelitian juga terungkap ternyata cukup banyak pelaku UKM yang belum memperoleh penanganan, fasilitas atau pembinaan dari berbagai pihak khususnya pihak pemerintah melalui BUMN.

## Simpulan

Secara garis besar, kegiatan penelitian ini menghasilkan beberapa arah kebijakan program kemitraan dan pembangunan yang semestinya dikembangkan BUMN dalam rangka membantu upaya pemberdayaan UKM di provinsi Jawa Timur yaitu: (1) dana dari program kemitraan dan pembangunan dari BUMN seyogianya dimanfaatkan

untuk mendorong perkembangan UKM yang berbasis pada sumber daya lokal (*local resources based*). Artinya, produk dan tenaga kerja yang terlibat dalam UKM tersebut harus dipasok dan berbasis dari kekayaan sumber daya alam lokal dan melibatkan sepenuhnya tenaga kerja masyarakat setempat; (2) UKM yang dikembangkan dengan stimulan dana dari program kemitraan dan pembangunan BUMN hendaknya berbasis pada pemberdayaan masyarakat lokal (*community development based*), 3) berbagai program *community development* yang dikembangkan BUMN hendaknya berbasis pada upaya pengembangan investasi dan mengutamakan pengembangan UKM yang berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan isu prioritas yang telah berhasil diidentifikasi, kebijakan dan program prioritas pemberdayaan UKM di provinsi Jawa Timur yang perlu dikembangkan di tahun-tahun mendatang dengan memanfaatkan dana BUMN adalah: (1) memanfaatkan dana *community development* dari BUMN untuk mendorong pengembangan penyangga ekonomi untuk mengurangi kadar kerentanan pelaku UKM, (2) pemanfaatan dana BUMN untuk perlindungan bagi pelaku UKM. Bentuk program yang dikembangkan yaitu: (1) pengembangan *cluster* UKM dan bantuan modal usaha berbunga murah; (2) pengembangan lembaga atau badan-badan penyangga atas komoditi yang dihasilkan UKM agar tidak terjadi distorsi harga dan pembagian margin keuntungan yang terlampau tipis bagi pelaku UKM; (3) pemanfaatan dana BUMN untuk kegiatan pelatihan dalam rangka mendorong pengembangan efisiensi biaya produksi dan manajemen pengelolaan UKM. Bentuk program yang dikembangkan berupa pelatihan efisiensi proses produksi, bantuan peralatan yang dapat bermanfaat mengurangi biaya produksi, atau program pelatihan manajemen pengelolaan UKM yang benar-benar kontekstual dan bermanfaat mendorong terciptanya efisiensi kerja pelaku UKM; (4) pemanfaatan dana BUMN untuk perlindungan dan pemberdayaan subkontraktor atau buruh di lingkungan UKM. Bentuk program yang dikembangkan selain bantuan modal usaha bagi subkontraktor atau buruh UKM, juga berupa

pengembangan kemandirian subkontraktor, baik di bidang produksi, pemasaran maupun pencarian bahan baku; dan 5) pengembangan jaringan dan peningkatan akses pelaku UKM terhadap sumber-sumber permodalan. Bentuk program yang dikembangkan bukan saja pemberian bantuan modal usaha murah, tetapi juga perlu didukung pembentukan institusi penjamin UKM agar mereka dapat memperoleh garansi dalam mengakses sumber-sumber permodalan alternatif di luar pedagang perantara, pengijon atau pengepul.

## Daftar Pustaka

- Baswir, R (1995) Industrialisasi dan konglomerasi di Indonesia. Prisma 10 Oktober 1995. Jakarta: LP3ES.
- Harianto, F (1991) Study on Subcontracting in Indonesian Domestic Firms. Jakarta: PEP-LIPI.
- Hendrawan, S (1994) Pengembangan industri kecil di Indonesia: Pelajaran analisa. Dampak dari Jawa Tengah. Prisma No. 9 September 1994 Jakarta: LP3ES.
- Huseini, M, Pramono, PW, Nurasa, H (1994) Pola kerja sama bapak-anak angkat pada perusahaan di perkotaan. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial No. 6: 41–62.
- Nugroho, R & Siahaan, R (2005) BUMN Indonesia, Isu, Kebijakan dan Strategi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nuryana, M (2005) Corporate Social Responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan, makalah yang disampaikan pada Diklat Pekerjaan Sosial Industri, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung, Lembang 5 Desember.
- Schermerhorn, JR (1993) Management for Productivity. New York: John Wiley & Son, Inc.
- Sukada, S & Jalal (2008) Pelaporan Keberlanjutan: Alat Akuntabilitas dan Manajemen makalah yang disajikan pada Seminar Dua Hari, Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Artayuda, Jakarta.
- Srimulyo, K (2001) Menakar peran BUMN di eEra otonomi. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 14(4): 55–76.
- Triharso, A (2009) Pemikiran tentang pemberdayaan masyarakat desa dan peranan pendidikan tinggi: implementasi kebijakan dari pro konglomerasi ke pro UKM. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik 12(4): 310–323.